



Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Irfan Prayogi* & Fernanda Putra Adela

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pilkada DKI Jakarta 2017 terbilang unik. Hal ini berkaitan dengan terbentuknya identitas dan keterbelahan sosial antarajinasi politik Islam secara spontan sehingga menghasilkan preferensi pilihan dalam kontestasi pesta demokrasi. Ucapan seorang Ahok menghasilkan konsekuensi kesadaran identitas kolektif yang ditandai dengan terbentuknya musuh bersama dalam wacana publik. Sehingga Aksi Bela Islam sebagai Aksi Simbolik kemarahan umat Islam menjadi penentu kemenangan Anies-Sandi dalam merebut kekuasaan di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Penelitian mengenai dua objek yakni Aksi Bela Islam dan Pilkada DKI Jakarta ini akan menggunakan data sekunder sebagai teknik pengumpulan data yaitu berupa surat kabar media cetak maupun kanal berita elektronik, serta bahan lain yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian termasuk video yang bersumber dari *youtube*, serta menggunakan studi analisis teks kualitatif sebagai teknik analisis data.

Kata Kunci: Aksi Bela Islam 212, Imajinasi Politik, Pilkada, Populisme Islam

Abstrak

The 2017 election of DKI Jakarta is unique. This is related to the spontaneous formation of Islamic identity and imagination of Islam resulting in a choice preference in democratic party contestation. Ahok's speech produces a conscious consequence of collective identity marked by the formation of a common enemy in public discourse. So that the Islamic Defense Action as a symbolic act of Moslem anger becomes the decisive victory of Anies-Sandi in seizing power in the election of Governor of DKI Jakarta.

This research on two objects namely Islamic Action and Election of DKI Jakarta will use secondary data as data collection technique that is in the form of newspaper print media and electronic news channel, as well as other materials that support and related to the research title including video sourced from youtube, and using a qualitative text analysis study as a data analysis technique.

Keywords: Election: Islamic Defense Action 212, Islamic Populism,

How to Cite: Prayogi, I. (2019). Populasi Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11 (2): 31-43

*Corresponding author:

E-mail: Irfanprayogi44@yahoo.com

PENDAHULUAN

Persatuan umat Islam yang tergabung dalam Aksi Bela Islam 212 merupakan peristiwa unik dalam kesejarahan Indonesia. Massa aksi menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dipenjarakan, karena dianggap menghina Ayat Al-Qur'an dalam pidato kunjungannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Bukan hanya warga DKI Jakarta saja yang melakukan aksi protes terkait penghinaan agama Islam tersebut, gerakan juga terjadi di berbagai daerah dengan waktu yang sama. Umat Islam semacam mendapatkan identitasnya kembali saat menghadapi 'musuh bersama'. Gerakan yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yakni demonstrasi Pada 14 Oktober 2016 yang diinisiasi oleh FPI, dan juga Aksi Bela Islam II pada tanggal 4 November 2016.

Peristiwa ini berawal saat seorang pengguna Facebook bernama Buni Yani mengunggah potongan Video Basuki di Kepulauan Seribu tersebut dengan judul 'Penistaan Terhadap Agama?'. Video itu langsung viral dan menjadi konsumsi publik hingga masuk ke dalam pemberitaan media massa. Respon yang datang dari berbagai kalangan pun beragam. Banyak umat Islam yang tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Basuki dan dianggap sebagai penodaan Agama dengan mengaitkan Surah Al-Maidah Ayat 51 dalam memilih pemimpin politik secara negatif. Basuki yang biasa di sapa Ahok mengingatkan kepada warga Kepulauan Seribu agar tidak

khawatir apabila dalam Pilkada nanti dirinya tidak dipilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan menekankan programnya akan tetap berjalan.

Momen ini - Aksi Bela Islam 212 - menjadikan umat Islam seperti mendapatkan suatu *new colective imaginary* yang manandai sebuah pembelaan atas agama. Bukan hanya dari DKI Jakarta, massa aksi 212 yang berpusat di Monas, juga diikuti oleh umat Islam di berbagai daerah. Persaudaraan dan identitas keagamaan kian muncul saat banyak tokoh agama dan alim ulama yang hadir sebagai representasi dari umat Islam yang Saleh. Pengutukan atas apa yang diucapkan Basuki dan harapan agar pemerintah tidak menghalang-halangi atau mengintervensi proses hukum yang tengah berlangsung, menjadi suatu demarkasi yang jelas bahwa Pemerintah tidak sedang dalam posisi yang sama dengan Umat Islam.

Aksi Bela Islam 212 yang merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya untuk meminta Basuki alias Ahok dipenjarakan kian bergeser ke ranah yang lebih politis. Dalam pidato dan orasi khususnya Habib Rizieq Shihab menyerukan kepada umat Islam untuk tidak memilih pemimpin kafir dalam kontestasi Pilkada yang akan berlangsung. Penghinaan terhadap Al -Qur'an dan ulama dianggap sebagai satu bentuk garis yang jelas dalam 'perang posisi' menuju Pilgub DKI Jakarta pada saat itu dengan tiga pasang kontestan. Antagonisme semakin terlihat jelas manakala sebelumnya umat Islam 'merasa' tertandingi oleh Parade Bhineka Tunggal Ika tepat di Bundaran HI pada 20 November 2016

yang diikuti oleh munculnya berbagai atribut partai. (Detik.com: 2016)

Wacana Islam dalam konteks bela agama ternyata digunakan sebagai basis suara politik. Massa 212 ini tidak hilang sampai sekarang dan malah bertransformasi menjadi komunitas 'Alumni 212' dengan berbagai agenda kegiatan di dalamnya. Transformasi ini tetap dijaga oleh aktor yang berkepentingan sebagai 'senjata' dalam rangka pemilu dan pilkada yang diadakan di Indonesia secara reguler. Bahkan tidak hanya di DKI Jakarta saja, alumni 212 yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia merasa harus memenangkan pasangan calon yang secara keagamaan dekat dengan komunitas 'Umat Islam' atau yang dianggap saleh. Berbekal media sosial, kampanye tentang gerakan populisme Islam dan sebuah *new collective imaginary* yang menyatukan mereka lewat kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok membuat massa semakin membesar. Penulis tertarik melihat keterbelahan massa di DKI Jakarta dalam kerangka politis: bagaimana masing-masing individu memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 15 februari 2017 dalam preferensi identitas.

Apa yang terjadi di DKI Jakarta dalam rangka Aksi Bela Islam merupakan bentuk daripada populisme Islam. Meminjam Istilah Vedi Hadiz, bahwa populisme Islam yang terjadi di Jakarta merupakan akumulasi dari bentuk kekecewaan masyarakat banyak (muslim) kepada negara, yakni rejim Joko Widodo yang tidak kunjung memenjarakan Ahok dengan kasus penistaan agama. Juga kekecewaan atas kondisi ekonomi-politik, dimana Islam sebagai identitas

mayoritas, tetapi merasa termarjinalkan. Dampak dari populisme Islam ini secara insidental berpengaruh terhadap pilihan politik warga DKI Jakarta yang diperhadapkan dengan Pilkada. Imajinasi politik Islam untuk mendapatkan pemimpin yang lebih mengedepankan masyarakat banyak dan termarjinalkan (pemimpin yang populis) merupakan kerinduan yang dipantik dengan kehadiran Ahok sebagai penista agama. Jadi, imajinasi politik dibangun dalam kerangka terlebih dahulu mengkonstruksi Ahok sebagai *the Other*, Karena dengan demikianlah, wacana tentang Islam dapat eksis.

Selepas penghitungan suara pada Pilgub DKI Jakarta putaran pertama, ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno mengumumkan secara resmi hasil pemilihan gubernur (Pilgub) bahwa pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapatkan 937.950 suara dengan presentasi 17,02% Sementara pasangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Syaiful hidayat mendapatakan suara 2.364.577 suara dengan presentasi 42,99%. Sedangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapatkan suara 2.197.333 dengan presentas 39,95% (Okezone.com: 2017/03/04). Dari data tersebut dapat dilihat pasangan Basuki-Djarot unggul dan diikuti oleh pasangan Anies-Sandi. Tetapi pemilihan belum berhenti sampai disitu dikarenakan tidak ada pasangan calon yang mencapai suara 50%. Dengan demikian, pasangan calon yang maju di putaran kedua adalah Anies-Sandi dan Ahok-Djarot.

Kemenangan Ahok-Djarot pada putaran pertama tidak serta

merta pula memenangkan pasangan tersebut di putaran kedua. Agus-Sylvi yang terdegradasi dalam putaran pertama memiliki masa pendukung dan memiliki suara 'mengambang' dalam Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua. Disinilah Anies-Sandi memperoleh suara terbanyak dengan presentasi suara 57,96% suara. Adapun Ahok-Djarot memperoleh presentasi suara sebesar 42,04 % suara. Penulis melihat adanya transplantasi suara dari Agus-Sylvi kepada Anies-Sandi. Transplantasi suara tersebut ada semacam keterpaksaan yang mengiring 'suara mengambang umat Islam' kepada Anies-Sandi dengan dasar sentimen kasus 'Penodaan Agama' sebelumnya dan konstruksi atas 'kafir' yang dilekatkan pada figur Ahok.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah analisa wacana. Disini, penulis tidak hanya terfokus kepada aktor yang memainkan bahasa didalam medan pewacanaan, tetapi juga memperhatikan basis sosial yang digunakan sebagai elemen dari tumbuhnya populisme, imajinasi sosial religius dan pilihan politik - dengan memperhatikan secara kronologis setiap kejadian-kejadian. Setelah secara genealogis Aksi Bela Islam dapat dibedah, maka langkah selanjutnya adalah mengkaitkan fenomena tersebut dengan hasil dari Pilkada DKI Jakarta yang memiliki irisan antara model kampanye, kebangkitan Islam dan sentimen yang bermuara pada kepentingan politik berjangka pendek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Facebook menjadi titik awal mencuatnya pemberitaan terkait penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersebar melalui akun facebook Buni Yani pada tanggal 6 Oktober 2016. Sebanyak 346,354 tayangan penyebaran wacana dan sebanyak 11.033 kali dibagikan ulang (*reshared*). Video sebagai salah satu produksi pengetahuan disempurnakan dengan caption menambah rasa ingin tahu pemirsa media sosial meningkat. Video yang diunggah dengan 346.364 tayangan, 3,8 ribu emoticon dan 11,033 komentar tersebut merupakan pemicu Aksi Bela Islam II (411) dan III (212) (Pamungkas dan Oktaviani, 2017: 75).

Hal yang membuat Aksi bela Islam menjadi polemik adalah bahwa aksi tersebut berkaitan dengan momentum Pilkada di DKI Jakarta, dan karenanya tuntutan untuk memenjarakan Ahok dengan pasal penodaan agama merupakan agenda politik yang sejak awal sudah dirancang dalam aksi tersebut oleh inisiator dan penggeraknya (GNPF-MUI). Polarisasi yang muncul melalui media sosial seakan-akan menepatkan posisi para *netizen* (pengguna media sosial) jika Anti Ahok dianggap sebagai 'pendukung rasisme yang intoleran' dan jika mendukung Ahok sebagai 'pendukung keragaman (pluralisme) yang sekuler'.

Apa yang ditunjukkan oleh Aksi Bela Islam khususnya dalam Aksi 212 adalah suatu kemampuan untuk memobilisasi sentimen 'agama' secara efektif tetapi dapat berdampak pada munculnya benih-benih kebencian yang mengatasmamakan agama dan rentan untuk difabrikasi sebagai kepentingan politik. Moralitas publik dalam konteks ini adalah bagaimana

konsepsi mengenai 'toleransi' ditujukan untuk lebih pada memberi penghormatan pada nilai-nilai yang dikonstruksikan kelompok mayoritas, dalam konteks inilah GNPF-MUI berhasil membangun konstruksi moral tentang 'persatuan umat Islam' dengan membingkai kasus Ahok sebagai suatu ajakan moral yang politis untuk membela Al Quran, membela ulama dan mengekspresikan bentuk pembelaan tersebut dengan bergabung di dalam pengorganisasian gerakan tersebut.

Dalam konteks ini, mobilisasi aksi bukan hanya ditujukan pada kepentingan politik jangka pendek (yaitu memenjarakan Ahok, dan tercapai), melainkan juga upaya untuk 'memelihara dukungan massa' yang telah mereka peroleh pasca Aksi Bela Islam 212 pada awal Desember 2016 di Jakarta. Upaya memelihara dukungan massa dalam bingkai wacana politik moralitas sebagaimana yang dikehendaki oleh GNPF-MUI itu dimulai melalui strategi membangun komunitas yang bukan hanya diperoleh melalui dukungan karena kampanye-kampanye di media sosial, melainkan juga untuk memperkuat basis massa secara konkrit, dan digagas melalui 'Gerakan Subuh Berjama'ah' secara nasional. Pemanfaatan medium 'ibadah' merupakan suatu cara untuk mengaburkan kesan bahwa gerakan tersebut diorkestrasi secara koersif (dengan cara cara memaksa dan anarkis).

Bangkitnya New Collective Imaginary Islam

Berangkat dari asumsi bahwa realitas tak hadir begitu saja kepada manusia. Realitas dimengerti oleh

manusia karena manusia menatanya sedemikian rupa dalam cara tertentu. Melalui penataan ini –atau dalam terminologi psikoanalisis, "simbolisasi" – realitas memperoleh koherensinya. Realitas menjadi sesuatu yang sistematis dan bisa dipahami oleh manusia. Realitas tak lagi menjadi rangkaian informasi berserak yang tak saling berhubungan. Ia kini memiliki suatu "aturan diskursif", suatu "narasi". Akan tetapi, proses formasi realitas ini tak hanya membuat manusia memperoleh realitas yang koheren di hadapannya. Lebih dari itu, aturan diskursif juga memberi manusia pengetahuan tentang siapa dirinya di dalam realitas tersebut. Dengan kata lain, narasi yang mengatur, membentuk, dan mensistematisasi realitas juga memberi manusia identitas tentang siapa dirinya (Laclau dan Mouffe, 2008; Žižek, 1989; Stavrakakis, 1999; Homer, 2005).

Kita bisa melihat bagaimana Aksi 212 merupakan satu momen di mana 'ummat' menjadi satu narasi yang menyatukan masyarakat dengan momentum 'mengutuk' Ahok atas ucapannya. Identitas bersama terbentuk dengan dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan wacana populis sebagai satu trajek menuju hegemonik. Laclau menggarisbawahi bahwa narasi yang menata realitas tak pernah stabil. Sebaliknya, narasi yang membentuk realitas bisa datang silih berganti seiring dengan terjadinya pergulatan di dalam masyarakat tentang bagaimana realitas semestinya dipotret. Ini bisa dilihat bagaimana wacana Bela Islam dapat menyatukan semua elemen masyarakat pada saat itu, di mana sebenarnya kondisi secara

sosial dan ekonomi, mereka yang hadir di monas tidaklah setara.

Laclau menjelaskan bahwa narasi hegemonik mengenai realitas mulai memperoleh ketidakstabilan ketika suatu "peristiwa" (*event*) muncul. Peristiwa adalah momen yang berada di luar jangkauan penjelasan narasi hegemonik. Ia adalah sesuatu yang tak bisa diintegrasikan ke dalam sistematika penjelasan tentang realitas, sesuatu yang berada di luar kemampuan aturan diskursif untuk menjelaskannya, dan karenanya mengganggu koherensi realitas maupun identitas manusia yang semula berada dalam naungan realitas itu. Pada titik ini, muncul sebuah "dislokasi". Narasi yang selama ini menstrukturkan realitas kehilangan kemampuannya untuk menjelaskan. Pada momen inilah narasi alternatif atas realitas masuk dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh kegagalan narasi terdahulu (Laclau, 2007; Zizek, 1989; Mouffe, 1992, 2000, 2008).

Berpijak dari kerangka berpikir di atas, Laclau menjelaskan bahwa populisme hadir tepat ketika sistem yang mapan mengalami dislokasi dan berubah menjadi tak stabil karena kemunculan peristiwa. Populisme mengisi celah yang hadir tatkala muncul jarak antara bagaimana realitas dinarasikan dan bagaimana peristiwa dialami oleh manusia. Usaha populisme untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh narasi lama tak pelak membuat narasi ini menyimpan ambiguitas. Meski di satu sisi berusaha menanggalkan narasi lama, narasi baru ini seringkali menciptakan realitas baru dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh narasi lama. Laclau

menulis: "[P]opulism presents itself both as subversive of the existing state of things and as the starting point for a more or less radical reconstruction of a new order whenever the previous one has been shaken" (Laclau, 2008: 177)

Bangkitnya imajinasi bersama umat Islam terkait dengan penolakan terhadap Basuki Tjahaya Purnama yang telah menistakan agama Islam bukan serta merta hadir dalam wacana ruang publik. Terjadi akumulasi kapital/modal untuk menjatuhkan Basuki alias Ahok dalam kontestasi pilkada, mulai dari tumbuhnya identitas sosial keagamaan hingga atribusi yang melekat pada Ahok sebagai sosok Gubernur yang beridentitaskan Tionghoa. Selain itu, romantisisme PKI juga didengungkan sebagai satu frasa yang nantinya akan bangkit kembali, lantas dikaitkan dengan Ahok dan Partai PDIP sebagai salah satu Partai pendukungnya.

Masih ingat dalam benak kita bagaimana Ahok menuduh K.H Ma'aruf Amin yang dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI dituduh oleh Ahok 'menjual' dalil Al Maidah demi kepentingan politis. Pada saat itu Ahok menuduh Ma'aruf dihubungi oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum Partai Demokrat telah bersekongkol untuk menjatuhkan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. Dengan nada keras, tuduhan itu dilontarkan oleh Ahok kepada Ma'aruf Amin dengan nada keras. Secara pewacanaan, apa yang dilakukan Ahok dalam persidangan kasusnya menjadi satu poin penting relasi sosial keagamaan umat Islam. Tentu, banyak yang merasa bahwa apa yang dilakukan atau ditunjukkan oleh Ahok kepada

Maa'ruf Amin tidak patut dan termasuk penghinaan terhadap ulama. Pengecaman ini termasuk datang dari para kiai dan santri Nahdathul Ulama, seperti Yeni Wahid, anak dari Abdulrahman Wahid alias Gus Dur. Sikap Arogan Ahok terhadap ulama mencerminkan Ahok tidak pantas dipilih oleh umat Islam. Walaupun pasca persidangan Ahok meminta maaf, namun wacana di ruang publik sudah menjustifikasi bahwa ia telah melakukan suatu penghinaan.

Dalam hal 212, maka gerakan ini tidak hanya terlaksana dalam konteks penghinaannya terhadap Al Qur'an dan penistaannya atas agama Islam. Lebih dari itu, aksi bela Islam merupakan rangkaian dari semua kejadian. Sikap arogansi Ahok misalnya, terkait pengusuran hingga proyek reklamasi disinyalkan juga sebagai wacana yang merugikan dirinya. Dari kedua hal ini, Ahok dicap sebagai gubernur yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Sentimen juga terbangun dari latar belakang Tionghoa dan konstruksi kafir atasnya sebagai sosok yang non Muslim. Isu yang terus berkelindan terkait dengan ketidakadilan tentu menjadi semacam kesempatan untuk masuk kedalam arena imajinasi yang lebih mengandung unsur ke'kita'an, kita yang digusur secara sosial, kita yang dimarjinalkan secara ekonomi dan kita yang di hina dalam

Imajinasi yang terbentuk dalam konteks menolak Ahok merupakan akumulasi dari berbagai peristiwa. Dalam istilah Laclau, bahwa proses menuju Hegemoni harus memenangkan pola persetujuan. 'Masyarakat' atau the social harus memasuki tiga registers secara berkala

sebagai konsekuensi logisnya. Pertama tentunya melakukan satu pengonstruksian akan ketakutan ketakutan atau misery, dimana pihak seberang menjadi semacam ancaman bagi identitas 'kita/muslim'. Saat ketakutan itu muncul seperti traumatis akan PKI, ketidakmurnian dalam beragama saat memilih pemimpin Islam, ketakutan dalam artian pengusuran yang terus berlanjut dan lain sebagainya maka taham selanjutnya imajinasi sosial pun timbul. Fenomena aksi 212 dalam konteks bela Islam merupakan akumulasi dari segala ketakutan itu, diimajinasikan, kemudian di anggaplah pihak seberang sebagai musuh, termasuk pendukung Ahok yang menyelenggarakan kegiatan aksi Parade Bhineka Tunggal Ika. Jadi, Miseri yang bertransformasi dalam imaginary lantas kemudian terjawantah dalam enemy, merupakan proses yang dilalui dalam suatu pengonstruksian wacana anti Ahok.

Dinamika Pilkada DKI Jakarta

Hasil di Pilkada DKI Jakarta 2017 menampakkan perolehan yang signifikan bagi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal ini bisa terlihat sebagaimana rekapitulasi akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang seperti hasil quick count sebelumnya meraih suara 57, 95% dengan jumlah pemilih sebesar 3.240.332 orang. Sementara itu Ahok meraih suara yang jauh dari prediksi beberapa kalangan, yakni sebesar 42,05% dengan jumlah pemilih sebesar 2.351.244 orang. Dalam Pilkada kali ini, dari total DPT yang ada, yakni sebesar 7.257.649 orang, yang menggunakan suara sebesar 5.661.655 orang. Pengguna

hak pilih naik apabila kita berkaca dengan pemilihan kepala daerah pada putaran pertama yang diikuti oleh 3 kontestan, yakni sebesar 5.563.207 yang juga diikuti dengan naiknya jumlah DPT (kpudkijakarta.go.id).

Pada putaran pertama, di mana yang bertarung adalah tiga kontestan, perolehan pada masing-masing pasangan adalah sebesar: Agus-Sylvi (17,1%), Ahok-Djarot (43,0%), dan Anies-Sandi (39,97%). Pada saat putaran pertama Pilkada sebenarnya tampak bagaimana Ahok memimpin perolehan suara. Tetapi apa yang terjadi pada putaran kedua, suara Ahok-Djarot stagnan bahkan turun (Okezone.com: 04/03/2017). Suara Agus-Sylvi tampak bertransplantasi ke Anies-Sandi. Tentu ini menjadi pertanyaan mengapa suara Agus semua beralih ke pasangan nomor urut 3.

Kedekatan Anies dengan kelompok Islam memang tidak dapat diragukan lagi. Mantan Rektor Universitas Paramadina sekaligus mantan Menteri pendidikan ini dikenal dengan Islamnya yang moderat. Selain modal partai pengusung (PKS, PAN dan Gerindra) modal sosial yang ia miliki juga besar manakala ia adalah mantan kader HMI. Kedekatan Anies-Sandi pada Pilkada DKI untuk merebut hati umat Islam dengan cara yang santun membuat mereka diterima pada banyak kalangan. Dengan tidak menolak Aksi Bela Islam, Anies bahkan membuat isu Al-Maidah sebagai nama pada produk sabun yang dikerjakan oleh Komunitas OK OCE. Komoditas 'Sabun Al-Maidah' ini tentu bukan nama yang tanpa hubungan kausalitas. Ada momen yang membuat Al Maidah ini eksis

dan menjadi bermakna. Ada beberapa upaya yang digunakan untuk membuat benda (sabun Al-Maidah) yang dijual punya sisi perbedaan agar dilirik. Jika meminjam istilah Koller dan Keller (2009: 179) 'mendefferenasiasikan dari produk pesaing, salah satunya adalah menempatkan atau menciptakan merk yaitu nama maupun simbol yang menjadi asosiasi dari produk yang menimbulkan maksud psikologis. Jika maksud psikologis itu tercapai, maka merek kemudian menjadi pendorong konsumen untuk memilih suatu produk.

Selain memanfaatkan sabun dalam bentuk komoditas dalam arti ingin mengkonservasi ingatan publik akan penistaan 'Al-Maidah', penggunaan Al-Maidah juga digunakan dalam aksi Tamasya Al Maidah untuk menjaga TPS-TPS pada pemungutan suara. Peserta yang bergabung rata-rata adalah simpatisan atau massa aksi 212, juga Aksi Bela Islam berikutnya. Baik dari Ormas yang terlibat maupun dari pihak Individu dengan membentuk sebuah panitia. Bukan hanya di pihak Anies saja yang menggunakan Al Maidah sebagai 'jualan', di sisi seberang juga menggunakannya. Ahok yang menggunakan Al Maidah sebagai merek dalam konteks yang berbeda. Seperti dalam debat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta di acara Mata Najwa (27/3), Anies menyebut bahwa Ahok melakukan hal-hal yang tidak perlu dan berpotensi semakin memperburuk situasi, seperti membuat nama wifi dengan kata 'Al Maidah' dengan kata sandi 'kafir'. Namun apa yang dilakukan Ahok sangatlah kontraproduktif, apalagi

Anies membeberkan dalam acara debat tersebut.

Aksi-Aksi massa yang pada perkembangannya menjadikan 'Al Maidah' sebagai merek dengan konsep differensial yang cukup kuat. Membuatnya punya kekuatan untuk dilirik oleh konsumen secara psikologis. Dari kegiatan 'Tamasya Al Maidah hingga pembuat sabun Al Maidah. Tentu kapitalisasi Al Maidah disatu sisi menguntungkan Anies, dan disisi lain sangat merugikan Ahok sebagai lawannya dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta (Tirto.id: 19/04/2017).

Interpelasi akan hasrat pemilih untuk mau memilih Anies-Sandi juga terlihat pada saat Pilkada putaran kedua saat Anies berpidato di hadapan sejumlah tokoh partai pengusungnya yang mengartakan bahwa 'Pertemuan kita malam hari ini, menuju perang Badar besok'. Tentu perang yang dimaksud adalah pertarungan antara dirinya dengan Ahok didalam kotak suara. Tetapi ungkapan perang yang diucapkan Anies menampakkan sebuah keinginannya akan militansi para pendukungnya.

Dengan menggunakan pendekatan Agama yang merupakan senjata ampuh dalam memenangkan suatu persetujuan, seperti yang dikatakan Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU: "Terus terang, saya agak surprised , karena saya menduga perbedaannya tidak sebanyak itu. tapi saya bisa memahami karena alat yang digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Ahok adalah alat yang sangat tajam'. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik

Universitas Indonesia mengatakan hal yang sama: 'Kemenangan Anies tampaknya memang disebabkan sebagian besar pemilih di Pilkada Jakarta yang jumlahnya sekitar tujuh juta orang lebih mementingkan kesatuan iman, sesama muslim, dibandingkan kemampuan program.' Selain itu Anies dianggap humanis, sehingga memuluskan dirinya untuk dapat diterima ditengah-tengah warga DKI Jakarta. Sebetulnya hal yang sama terjadi pula kepada para pemilih Ahok-Djarot, walaupun ada faktor seperti kinerja yang bagus, program yang bagus, karakteristiknya yang bersih, tidak korupsi, tegas dan bisa memimpin, namun sentimen identitas juga terbangun di sana. Hal ini terkait dengan kondisi psikologis di mana distingsi yang dilakukan para pendukung Anies akan membuahkan resistensi pada kubu pendukung Ahok. Sehingga banyak orang Thionghoa yang ramai-ramai datang ke TPS, yang merupakan fenomena unik pasca reformasi.

Kemenangan Anies yang didukung berbagai kekuatan keagamaan seperti Partai Keadilan Sejahtera, Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, dan Gerakan Nasional Pengawas Fatwa MUI ini dipandang mewakili kecenderungan Indonesia semakin mengarah ke kanan. Hal ini terjadi karena sejumlah muslim merasa tidak terwakili selama ini (termarjinalkan) dalam hal ekspresi-ekspresi politik dan ekspresi-ekspresi eknes ekonomi. Pilkada DKI menjadi ajang kesempatan untuk mendesakkan, dan mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Kecenderungan semakin ke arah kanan secara politik yang berciri konservatif memang tidak hanya

terjadi di Indonesia. Inggris dengan Brexit dan kekuatan partai Konservatif, serta kemenangan Trump dan partai Republik di Amerika Serikat menjadi contoh-contoh lain (BBC.com: 20/04/2017).

Manuver Anies dalam hal mencari dukungan dengan mendatangkan diri ke FPI adalah karena memang tidak banyak pilihan lain yang tersedia baginya. Setelah elektabilitas Ahok turun akibat tuduhan penistaan agama yang menjeratnya hingga ke pengadilan, ternyata dukungan calon pemilih tidak beralih ke Anies. Dari berbagai survei terlihat dukungan terhadap Anies stagnan dan tak ada limpahan atau transplantasi dari penurunan elektabilitas Ahok. Alih-alih mendekati dan menarik simpati masyarakat yang semula mendukung Ahok, Anies mengambil jalan pintas dengan mendekati FPI. Secara emosional dirinya berpidato dengan membesar-besarkan aksi 212 di Monas. Dengan cara ingin menarik simpati FPI, dirinya memuji dengan mengatakan "Dunia sudah dibikin terkaet-kaget oleh Indonesia". Ia juga seolah kaget dengan menyatakan bahwa FPI tidak seperti apa yang digambarkan dan diberitakan di media. Tak sulit menebak apa yang diinginkan Anies. Ia mengharapkan dukungan FPI yang dianggapnya berhasil memobilisasi massa besar hingga mencapai 8,8 juta umat Muslim.

Kita dapat melihat secara kalkulasi bahwa apa yang dilakukan Anies sebenarnya menurunkan citranya terhadap pemilih yang lebih berpreferensi rasional. Namun ada keuntungan yang ia dapatkan dari kunjungan ini. Pertama, keberhasilan

FPI menjadi aktor utama penggalangan massa besar dalam Aksi Bela Islam di monas yang tak terlepas dari isu penistaan agama yang ditudugkan kepada Ahok. Tanpa memanfaatkan dan memanipulasi isu sensitif seperti ini mustahil FPI akan dapat menghimpun massa banyak. Hal ini juga untuk mengkontraskan dirinya dengan Ahok, di mana ia menginginkan agar suara yang berada di 'seberang' Ahok dapat mengalir kepadanya. Mudahnya umat Muslim terprovokasi dan tersinggung merupakan sebuah keuntungan yang dapat dimanifestasikan dalam kotak suara. Kedua, walaupun secara resmi terkait penistaan agama, Majelis Ulama Indonesia terlebih dahulu mengeluarkan sikap pernyataan bahwa Ahok menista, namun yang memanfaatkan situasi dalam konteks gerakan massa adalah FPI, yang memanfaatkan fatwa dan pengaruh MUI secara sikap untuk memobilisasi massa. Jadi, apa yang dilakukan oleh MUI dan FPI adalah efek simbolik dengan menghadirkan musuh bersama sebagai pembentukan identitas keIslaman massa.

Ketiga, FPI sendiri sebenarnya menyadari tidak punya dukungan riil di masyarakat dan keberadaan dan visibilitasnya tergantung pada isu. Itu sebabnya mereka tidak menjelma menjadi partai politik. Keengganan FPI menjadi partai inilah yang membuat masyarakat sebenarnya percaya kepada FPI dengan menganggap FPI melakukan pembelaan terhadap agama dan jiwa ksatrianya bagi mereka yang percaya dengan pergerakan FPI dan penistaan yang dilakukan Ahok. Seiring degradasi kepercayaan publik

terhadap partai politik juga tampaknya mendukung keeksisan FPI sebagai gerakan 'volunteer' yang menggerakkan massa sehingga akan muncul imajinasi politik bersama nantinya dalam hal Pilkada Jakarta.

Untuk mendekatkan titik persamaan (*logic of equivalence*,) Anies dalam pertemuannya dengan FPI mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya adalah seorang syi'ah, namun menolak juga dikaitkan dengan pemikiran liberal dan mengaku berhasil memadamkan api kontroversial di Paramadina. Termasuk yang terakhir ini adalah kontroversi seputar penerbitan buku *Fiqih Lintas Agama* (2003). Tiga isu itu memang menjadi musuh FPI. "Saya bukan Syi'ah, saya Ahlus Sunnah wal Jamma'ah'. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa FPI merupakan organisasi anti Syi'ah dan Anies ingin menggugurkan stigma tersebut atas dirinya demi munculnya kesamaan identitas. Begitu juga saat Anies mengklarifikasi soal liberalisme dan gagasan baru yang diperkenalkan oleh Nurcholis Madjid. Tampak sekali Anies menjadi ikut-ikutan bersimpatik seperti cara pandang orang-orang FPI. Dan pernyataan berikutnya adalah "Ada buku 59 Tokoh Liberal dan siapa saja mereka. Dan disana tak ada nama Anies. Jadi, liberal tak menganggap saya sebagai liberal ." (Geotimes.co.id: 05/01/2017)

SIMPULAN

Isu Al-Maidah yang dimainkan sebetulnya merupakan bentuk protes antara dalam nuansa perlawanan terhadap Ahok. Al Maidah hanyalah dalih dari setiap perjumpaan

kekecewaan yang difiksasi dalam satu titik nodal bernama 'ummat'. Kita mengetahui bahwa dalam Aksi Bela Islam, di dalamnya terdapat berbagai identitas dan basis kelas sosial yang berbeda. Kepercayaan diri bahwa mereka direpresentasi dengan penanda 'umat' membuat kepercayaan diri tumbuh dan meluapkan kekecewaan mereka. Bahkan dalam konteks lain, ada beberapa kekecewaan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pimpinan nasional untuk skala yang lebih luas dengan menggunakan momentum Aksi Bela Islam.

Mobilisasi massa yang dilakukan oleh pihak-pihak atau organisasi dengan dibantu dengan demagog seperti Rizieq Shihab, membuat artikulasi kekecewaan semakin banyak. Artikulasi momentum yang memanfaatkan narasi 'Bela Islam' secara afektif akan menyentuh perasaan untuk membela identitas yang dimiliki oleh seseorang. Kejadian ini membuat terjadinya polarisasi dengan mengandaikan kesamaan identitas yang dikonstruksikan. Preferensi yang mendahului rasionalitas menjadi dinding pembatas antara 'aku' dan 'yang bukan aku'. Oleh karenanya kita dapat melihat bagaimana keterbelahan terjadi di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia. Mengapa terjadi polarisasi yang saling menegasikan ini? Jawabannya menurut penulis adalah akibat adanya penanda yang membedakan antara yang 'Bhineka' dan 'Ummat'. Terjadinya polarisasi juga akibat dari hadirnya 'musuh' bersama yang dikonstruksikan. Di kubu 'Ummat' me-liyan-kan Ahok, di kubu 'Bhineka' me-liyan-kan Rizieq.

Dengan hadirnya polarisasi, maka yang hadir kemudian adalah *new collective imaginary* yang bersumber dari *new social misery*. Ini terjadi akibat satu sama lain saling menegasikan. Kebangkitan yang saling 'mem-fanatikan' identitas inilah yang kemudian terejawantah dalam pilihan secara elektoral. Maka sebetulnya Aksi Bela Islam 212 tidak bertautan secara langsung dengan keterpilihan Anies-Sandi. Tetapi Aksi ini merupakan bentuk perlawanan secara simbolitas dan simbolik ini akan menjadi sebuah cerita tentang kejayaan Umat yang menghantam pandangan *the other* mengenai Islam yang fundamental. Aksi 212 menjadi sarana akumulasi sekaligus menunjukkan kepada 'seluar' dirinya bahwa Islam dapat bersatu, tentu dengan mengandaikan musuh yaitu 'Ahok'.

Titik jenuh kepada Ahok inilah, dengan mengandaikan titik persamaan kepada Anies-Sandi, maka warga DKI menghendaki Anies sebagai pemimpin DKI Jakarta. Yang menarik adalah transplantasi suara dari Agus-Sylvi hampir keseluruhan beralih ke Anies. Dengan demikian maka ada korelasi antara kebangkitan umat di Jakarta, Anies yang memiliki logika persamaan dengan umat Islam, dan preferensi politik Islam dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Maka, sebagai penanda yang 'baik' bagi elektoral, 212 menjadi sejarah yang menghadirkan romantisme.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam jurnal ilmiah

Ali, F. (2016). *Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik dan Dilema Negara Hukum Demokratis dalam Maarif: Arus*

Pemikiran Islam dan Sosial. Vol. 2 No. 11. Maarif Institut Jakarta.

Alvian, R. A. (2016). *Ekonomi-Politik Aksi Bela Islam: Pluralisme dalam Krisis? Dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol 11 No. 2. Maarif Institut, Jakarta.

Burhani, A. N. (2016). *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol 11, No. 2. Maarif Institut, Jakarta.

Hardiansah, A. G. dkk. (2016). *Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, Dan Persepsi Ancaman Kemananan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?*. Universitas Padjajaran, Vol. 2, No. 1. Jurnal Wacana Politik.

Ichwan, M. N. (2016). *MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 2. No. 11. Maarif Institut, Jakarta.

Karim, A. G & Bayo, L. (2016). *Ummat, Warga dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 2 No. 11. Maarif Institut, Jakarta.

Kusman, A. P. (2016). *Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 11 No. 2. Maarif Institut, Jakarta.

Latief, H. (2016). *Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca "Aksi Bela Islam" 2016 dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 2 No. 11. Maarif Institut, Jakarta.

Mark & Nurish. (2016). *Quo Vadis FPI dalam Aksi Bela Islam dalam Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 2 No. 11. Maarif Institut, Jakarta.

Pamungkas, A. S. & Oktaviani. (2017). *Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring*, Vol. 4 No. 2. Jurnal Pemikiran Sosiologi.

Wildan, M. (2016). *Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia dalam*

Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial. Vol. 2 No. 11. Maarif Institut, Jakarta.

Buku teks:

Damanik, A. T. *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalisme*. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), 2010.

Hadiz, V. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press, 2016.

Howarth, D. *Discourse*. St Edmunds: St Edmundsbury Press, 2000.

Hutagalung, D. *Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe dalam HSS*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.

Jorgensen, M. & Philips L. *Analisis Wacana, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Laclau, E. & Chantal, M. *Hegemoni dan Gerakan Sosialis: Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.

Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Smith, Anthony D. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Artikel dalam surat kabar/majalah online:

F, Achmad. (2017/03/04). Ini Hasil Pilgub DKI Putaran Pertama, Jakarta. Detik.com, Jakarta

Kpudkijakarta.go.id/Hasil Pilkada DKI Jakarta

Khadafi, A. (2017/4/19). Komoditas Al-Maidah. Tirto.id, Jakarta

Aziz, N. (2017/3/20). Ketika Anies-Sandi Menang dengan Kekuatan Islam. BBCNews.com, Jakarta.

Anies Baswedan dan Otak Mendulang Suara. Geotimes